

TAJUK RENCANA

Pemda Ditantang 'Cekat-Ceket'

PEMERINTAH akhirnya memperpanjang PPKM Darurat, hingga tanggal 2 Agustus. Meski dampaknya cukup berat, namun pemerintah menganggap harus dilakukan lagi. Sebab gelombang kedua badai Covid-19, ternyata jauh lebih dahsyat. Kasus harian di sejumlah daerah, termasuk DIY luar biasa lonjakannya. Sekitar 400 persen dibanding gelombang pertama. Varian Delta membuat Indonesia benar-benar repot. Terakhir, negara lain seperti AS, Australia, Singapura juga merasakan dampak virus yang sudah mutasi tersebut, sehingga mulai lagi menerapkan lock down.

Perpanjangan PPKM Darurat tersebut dilakukan, berdasarkan parameter laju transmisi, responsive masyarakat serta kondisi sosiologis. PPKM levelnya dari 1 sampai 4. PPKM Darurat yang dilakukan saat ini, adalah level teratas.

Yang paling merasakan adalah pelaku usaha. Penyakitkan dimanamana, yang dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat membuat para pelaku usaha yang mengandalkan hidup dari penghasilan harian merasakan sebagai pukulan berat. Hidup makin susah, karena bersamaan dengan penerimaan siswa baru, yang membutuhkan dana untuk daftar ulang sekolah anaknya misalnya. Koran Kedaulatan Rakyat beberapa kali menurunkan tulisan keluhan sekaligus surat kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan.

Dalam PPKM level 4 tersebut, memang ada beberapa pelanggaran. Misalnya rumah makan bisa melayani pembeli namun hanya boleh 20 menit. Bisa dibayangkan bagi penjual makanan yang harus dimasak khusus, tentu harus berhitung waktu. Jumlahnya juga maksimal 3 orang (KR 27/7).

Malioboro dan sejumlah lokasi lain dilonggarkan aturannya, Misalnya penjual diatur secara bergiliran agar tidak menimbulkan kerumunan. Sementara Bansos DIY dan Pemerintah Pusat dipercepat pembagiannya.

Tentu tidak segampang itu mengatasinya. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan, bahwa kelompok 40% masyarakat menengah dan 20 % kelompok teratas, cenderung menahan untuk tidak membelanjakan uangnya untuk barang-barang di luar sembako. Alasannya, karena ketidakpastian situasi membuat mereka khawatir. Data semacam inilah menunjukkan bahwa kondisi sekarang daya beli merosot jauh. Data dari perbankan juga menunjukkan kelompok 40 % ini, lebih suka menabung karena kekhawatiran kondisi yang belum menentu.

Untuk mempercepat semuanya langsung diterima masyarakat, diperlukan kerja keras pemerintah daerah juga. Data yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut serapan anggaran pemerintah daerah masih di bawah 25%, artinya serapannya masih rendah. Misalnya saja Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Rp 28, 8 Triliun untuk 8 juta kelompok penerima, hingga saat ini realisasinya baru Rp 6,11 Triliun atau 21,2 persen. Bantuan lainnya juga disiapkan oleh Kementerian tenaga Kerja untuk pekerja. Demikian juga bantuan insentif bagi pelaku usaha mikro informal Rp 1,2 juta untuk 1 juta pelaku usaha mikro.

Meski belum tentu cukup, namun usaha Pemda DIY menggelontorkan Bansos diharapkan segera merata. Demikian Bansos dari pemerintah agar segera tersealisasi. Karena sebelumnya Mendagri mengirimkan surat resmi ke 16 pemerintah daerah untuk segera merealisasikan bantuan anggaran untuk Covid-19.

Kerjasama dan kecepatan pemerintah daerah ditantang, agar 'cekat ceket'. Masyarakat sudah benar-benar di ujung tanduk. (***)

menimbulkan kerumunan. Sementara Bansos DIY dan Pemerintah Pusat dipercepat pembagiannya.

Tentu tidak segampang itu mengatasinya. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan, bahwa kelompok 40% masyarakat menengah dan 20 % kelompok teratas, cenderung menahan untuk tidak membelanjakan uangnya untuk barang-barang di luar sembako. Alasannya, karena ketidakpastian situasi membuat mereka khawatir. Data semacam inilah menunjukkan bahwa kondisi sekarang daya beli merosot jauh. Data dari perbankan juga menunjukkan kelompok 40 % ini, lebih suka menabung karena kekhawatiran kondisi yang belum menentu.

Untuk mempercepat semuanya langsung diterima masyarakat, diperlukan kerja keras pemerintah daerah juga. Data yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut serapan anggaran pemerintah daerah masih di bawah 25%, artinya serapannya masih rendah. Misalnya saja Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Rp 28, 8 Triliun untuk 8 juta kelompok penerima, hingga saat ini realisasinya baru Rp 6,11 Triliun atau 21,2 persen. Bantuan lainnya juga disiapkan oleh Kementerian tenaga Kerja untuk pekerja. Demikian juga bantuan insentif bagi pelaku usaha mikro informal Rp 1,2 juta untuk 1 juta pelaku usaha mikro.

Meski belum tentu cukup, namun usaha Pemda DIY menggelontorkan Bansos diharapkan segera merata. Demikian Bansos dari pemerintah agar segera tersealisasi. Karena sebelumnya Mendagri mengirimkan surat resmi ke 16 pemerintah daerah untuk segera merealisasikan bantuan anggaran untuk Covid-19.

Kerjasama dan kecepatan pemerintah daerah ditantang, agar 'cekat ceket'. Masyarakat sudah benar-benar di ujung tanduk. (***)

Isolasi Mandiri yang Produktif

Rahma Sugihartati

indikasi waktu yang dihabiskan para netizen untuk mengakses informasi di dunia maya makin meningkat. Setiap hari, boleh jadi berjam-jam waktu yang dihabiskan anak muda yang isoman maupun yang *stay at home* untuk



grafi. Tetapi dengan kemampuan digitalnya yang lebih maju, tidak sedikit anak muda yang bisa bebas menikmati cyberporn tanpa sensor. Ketiga, kemungkinan terjerumus dalam program kanalisasi paham radikalisme yang banyak ditebar di dunia maya.

Tawaran

Anak-anak muda yang memiliki karakteristik selalu ingin tahu hal baru, terkadang tanpa sadar mereka terjerumus pada tawaran paham radikal yang dikemas sedemikian rupa. Banyak kasus membuktikan bahwa anak muda terjerumus dan terpengaruh paham radikalisme melalui dunia maya yang mereka akses dari kamar tidurnya. Untuk memastikan agar masa isoman tidak kontra-produktif, selain dibutuhkan sosialisasi tentang literasi kesehatan, yang tak kalah penting sebetulnya adalah literasi kritis dari para netizen yang melakukan isoman. Tinggal di rumah dan kurang menyapa jaringan sosial yang dimiliki jangan membuat pelaku isoman makin soliter. Tinggal di rumah dan memiliki kesempatan mengakses informasi di dunia tanpa batas, harus menjadi kesempatan bagi para netizen untuk mengembangkan diri dan mampu memilah. Mana informasi yang salah dan mana informasi yang bermanfaat.

*) *Dr Rahma Sugihartati, Dosen Isu-isu Masyarakat Digital FISIP Universitas Airlangga*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

 **pikiranpembaca@gmail.com**  **0895-6394-11000**

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat

Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.

Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Solusi Mengolah Sampah

HINGGA saat ini sampah masih menjadi permasalahan utama. Tempat pembuangan akhir (TPA) nampaknya tak lagi mampu menampung kapasitas sampah yang kian hari semakin meningkat. Beberapa TPA memilih melakukan perluasan area, namun belum sepenuhnya menjadi solusi justru menimbulkan kontroversi. Jika TPA semakin diperluas maka tentunya pencemaran udara dan air tanah akan semakin meluas.

Permasalahan sampah tidak akan pernah selesai jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam meminimalisasi sampah. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah melalui pemilahan sampah rumah tangga dan memanfaatkannya menjadi barang bernilai jual.

Terdapat tiga hal penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Pertama, milah sampah anorganik (sampah yang tidak mudah terurai) dan melakukan daur ulang melalui aplikasi Rapel. Aplikasi ini mengelola daur ulang sampah secara digital. Dari sampah yang didaur ulang akan menghasilkan profit. Selain itu, terdapat pula fitur rincian harga beserta daftar berat sampah yang didaur ulang. Profit yang didapatkan pun terbagi menjadi dua, yakni pemasukan tunai dan nontunai. Pengelolaan sampah anorganik berbasis entrepreneurship ini sangat mudah dilakukan dan dapat memberikan efisiensi serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Kedua, melakukan pemilahan sampah organik (sampah yang mudah terurai) untuk dijadikan pupuk kompos. Terdapat dua metode dalam pengolahan pupuk kompos, yaitu metode aerob (pengolahan terbuka) dan anaerob (pengolahan tertutup). Pengolahan ter-

buka dapat dilakukan dengan melektakkan sampah organik pada tanah, media terbuka (komposter), maupun di atas tanaman. Dalam kurun waktu tertentu, sampah tersebut akan terurai dan menjadi pupuk alami. Pengolahan anaerob atau tanpa udara dilakukan dengan bantuan EM4 dan molasse. Dengan mencampurkan tanah, sampah organik beserta EM4 dan molasse, maka sampah-sampah organik tersebut akan teruraikan menjadi pupuk dengan komposter tertutup atau tanpa udara.

Ketiga, menggunakan maggot sebagai media pengurai sampah organik. Larva atau maggot BSF merupakan pengurai alami yang dapat menguraikan sampah. Cara yang digunakan dengan memberi sampah-sampah organik pada maggot sebagai pakan. Maggot BSF ini dapat dijadikan sarana budidaya, sebab maggot memiliki nilai ekonomi, yakni dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Dengan penyediaan dan persiapan media yang tepat, budidaya maggot dapat berkembang dengan baik. Selain berguna sebagai pengurai alami, sisa-sisa makanan dan kotoran maggot atau yang disebut kasgot (bekas maggot) dapat berfungsi menjadi pupuk alami.

Trik pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga ini dimaksudkan untuk meminimalisasi volume sampah yang dibuang ke TPA. Selain itu, trik ini dapat menjadi sarana ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk mendatangkan profit. Mari olah sampah jadi berkah, tak selamanya sampah menjadi sumber masalah jika dikelola dengan bijak. □

Ajeng Suci Ratnaningsih
Mahasiswa PBSI FKIP
UAD Yogya.

Investasi dan Transaksi Digital

TRANSAKSI keuangan dan investasi melalui platform digital di Indonesia semakin marak. Perbankan maupun lembaga keuangan non bank ramai-ramai mengeluarkan aplikasi sistem pembayaran dengan menawarkan segala kemudahannya. Tak hanya untuk layanan transaksi belanja sehari-hari. Model pembayaran digital pun kini meluas untuk kebutuhan lain seperti investasi atau produk bisnis yang lainnya.

Kementerian Investasi mencatat dalam 3 tahun terakhir, transaksi investasi dengan platform digital terus meningkat hingga US\$ 10 miliar. Apalagi di masa pandemi covid transaksi digital dalam investasi menjadi keniscayaan. Perubahan perilaku transaksi menjadi serba online pun kian cepat tat kala pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan aktivitas fisik.

Ekosistem Digital

Deputi Direktur Program Management Office BSPI 2025 Bank Indonesia (BI) Agung Bayu Purwoko mengakui, ekosistem digital di Indonesia cukup maju dalam beberapa tahun belakangan ini. Di kawasan Asia Pasifik, bahkan Indonesia tergolong cepat dalam pengembangan transaksi digital.

Beberapa metode yang digunakan dalam bertransaksi digital ini antara lain bisa dengan mobile banking, sms banking, internet banking, QRIS, virtual account, uang elektronik atau aplikasi pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan non bank. Keberadaan sejumlah kanal pembayaran inipun turut mendorong penetrasi penggunaan teknologi digital. Karena di bagian *end user* sudah tersedia yakni mulai dari *e-commerce, food*, atau layanan lainnya.

Demikian pula di sisi hilir yakni penyedia layanan dalam hal ini perbankan dan perusahaan-perusahaan *financial technology* (fintech). Kedua pemain

Tasroh

di industri pembayaran tersebut baik yang berstatus pemain lama seperti bank maupun fintech terus melakukan kolaborasi di tengah kompetisi yang kian sengit, sehingga mendorong munculnya ekosistem yang saling terkait.

Meski demikian, yang tidak boleh dilupakan adalah terkait keamanan data dan edukasi/literasi digital dalam ekosistem pembayaran digital. Kenapa? Karena kita kerap mendengar masih ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan. Mereka diduga mendapatkan data konsumen dari pihak-pihak tertentu yang sengaja menjual data kita.

Catatan Polri (2020) menegaskan di tengah euforia transaksi digital khususnya dalam produk investasi, dalam 3 tahun terakhir ditemukan 1.875 kasus investasi bodong, penipuan investasi dan investasi online yang merugikan masyarakat yang tak paham transaksi digital. Masih banyak predator transaksi digital dalam berbagai produk investasi yang berkeliaran mencari mangsa. Untuk itu, sistem keamanan dan edukasi literasi digital sangat penting untuk menjadi perhatian semua pihak.

GPN

Pembayaran secara online ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Gerakan Pembayaran Nasional (GPN) yang dicanangkan pemerintah. Model ini kemungkinan akan terus mengalami perkembangan dan diimplementasikan di banyak sector. Mengingat potensinya yang luar biasa besar. Kemendag memperkirakan, ni-

lai ekonomi digital di tanah air akan mencapai Rp 4.531 triliun pada 2030.

Berdasarkan data BI, kebijakan GPN dan kewajiban standar nasional teknologi chip (SNTC) bahkan telah membawa 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta usaha kecil dan menengah (UMKM) ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi.

Di titik inilah, pemerintah berharap tren transaksi digital semakin menambak semarak investasi. Sekaligus kian mencerdaskan masyarakat untuk mengikuti kemajuan zaman: investasi dan transaksi digital dua sisi mata uang yang dapat mendorong ekonomi rakyat, ekonomi nasional untuk akselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.

*) *Tasroh MPA MSc, Tim Pengembangan Investasi Daerah/Kepala Bidang Litbang di Bappedalitbang Pemkab Banyumas*

Pojok KR

PPKM Level 4 diperpanjang, Malioboro dilonggarkan.
* Tapi daya beli rakyat, masih merosot.

Tinggi, pelaku isoman di rumah yang meningkat.
* Pantau terus, jangan biarkan sendirian.

Serapan anggaran Bansos Pemerintah masih rendah.
* Pemda perlu ekstra kerjanya.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkrk23@yahoo.com, iklandrkrk13@gmail.com.

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenah. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandrkrk23@yahoo.com, iklandrkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). **Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.